

Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap Kesadaran Hukum pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar

Rabiatul Adawiyah ^{a, 1*}, Jumili Arianto ^{b, 2}, Indra Primahardani ^{c, 3}

^{abc} Universitas Riau, Indonesia

¹rabiatul.adawiyah4413@student.unri.ac.id *; ²jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id;

³indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id

* rabiatul.adawiyah4413@student.unri.ac.id

Informasi artikel

Diterima:

24-03-2024

Disetujui:

31-05-2024

Kata kunci:

Pengaruh

Pembelajaran PPKn

Kesadaran Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan hubungan sebab-akibat (kausal). Populasi penelitian meliputi seluruh siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar, yang berjumlah 320 siswa dari kelas VII, VIII, dan IX pada tahun 2023/2024. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik proporsional random sampling yaitu teori dari Suharsimi Arikunto, dengan 25% dari total populasi, sehingga jumlah responden adalah 80 siswa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25. Analisis data meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis (uji F), uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum.

ABSTRACT

The Influence of PPKn Learning on Legal Awareness in Students at SMP Negeri 1 Batu Hampar. This research was conducted to find out whether there is an influence between PPKn learning and legal awareness among students at SMP Negeri 1 Batu Hampar. This research uses a quantitative approach with associative methods and causal relationships. The research population includes all students at SMP Negeri 1 Batu Hampar, totaling 320 students from classes VII, VIII and IX in 2023/2024. The research sample was selected using a proportional random sampling technique, namely the theory of Suharsimi Arikunto, with 25% of the total population, so the number of respondents was 80 students. Data was collected using questionnaires and documentation, and analyzed using the IBM SPSS version 25 application. Data analysis included normality test, linearity test, simple linear regression test, hypothesis test (F test), correlation coefficient test, and coefficient of determination test. The research results show that Civics learning has a positive influence on legal awareness.

Keywords:

Influence

Civics Learning

Legal Awareness

Copyright © 2024 (Rabiatul Adawiyah, Jumili Arianto, Indra Primahardani). All Right Reserved

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tingkat pendidikan tinggi” (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi dan tujuan untuk membangun karakter bangsa dan memberdayakan warga negara. Visi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mengusulkan mata

pelajaran yang memperkuat jati diri bangsa dan memberdayakan warga negara, hal ini dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang menekankan pada pembangunan bangsa dan karakter. Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dengan kesadaran politik, hukum, dan moral (Susanto, 2016:100). Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang melekat dalam diri manusia untuk senantiasa mematuhi dan menghormati hukum, yang mana sebagai sebuah konsep yang sudah dipahami dan dirasakan oleh individu, kesadaran hukum

menjadi kunci penting dalam menjalankan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Fatkhurrahman, 2020:61). Kesadaran hukum merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat, termasuk siswa sebagai bagian dari civitas akademika di sekolah. Siswa yang sadar hukum cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah dan di masyarakat. Sebaliknya, jika kesadaran hukum siswa rendah, pelanggaran di masyarakat dan sekolah akan meningkat.

Pada kenyataannya saat ini kita sering berhadapan dengan fenomena-fenomena yang menjadi masalah serius, salah satunya adalah kemerosotan moral. Banyak tindakan yang dianggap menyimpang dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh remaja dalam melanggar hukum. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada maka diperlukan strategi baru dalam mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Dalam upaya membangkitkan kesadaran hukum masyarakat yang mulai terpuruk, maka yang perlu diubah bukanlah sistem hukumnya melainkan manusia atau masyarakatnya. Moralitas, kapasitas mental, dan kecerdasan harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan itu semua diperlukan pendidikan.

Sebenarnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum remaja masih rendah, untuk mencegah pelanggaran aturan pentingnya untuk membangun kesadaran hukum yang kuat, kesadaran hukum ini sebaiknya ditanamkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat menciptakan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pendidikan tidak hanya membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga membantu kemajuan bangsa dan negara secara keseluruhan (Pradesa, 2020:35).

Upaya yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum pada siswa adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bahwasannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki fokus yang jelas pada pembentukan moral peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat maupun sekolah yang patuh pada hukum dan aturan (Somantri, M. N., & Winataputra, 2017). Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting untuk

membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Trisiana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghayati, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terlahir sebagai warga negara yang bisa bertanggung jawab dan dapat diandalkan (Trisiana, 2020:34).

Berdasarkan hasil wawancara dari observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Batu Hampar kepada guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Batu Hampar berinisial W. F (28 tahun), beliau mengatakan bahwa kesadaran hukum siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar masih tergolong rendah dimana masih banyaknya siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Dilihat dari buku tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Batu Hampar pada tahun 2023 adapun pelanggaran aturan dan tata tertib di sekolah yang dilakukan oleh siswa yaitu merokok yang mana rata-rata dilakukan oleh siswa kelas 8 dan 9 jika dipresentasikan sekitar 7% adapun penyelesaiannya yaitu diberi peringatan terakhir dan tidak diulangi lagi, siswa juga berkelahi dengan teman sejawatnya dimana penyebab awalnya korban hanya bercanda namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi pengeroyokan hal ini dilakukan oleh sesama siswa kelas 7 jika dipresentasikan sekitar 6% adapun penyelesaiannya yaitu dengan cara pemanggilan orang tua, di skor selama 1 minggu dan korban dibawa ke rumah sakit/puskesmas. Siswa juga melanggar peraturan di kelas yaitu mematahkan kursi di kelas, dan sering tidak datang ke sekolah yang rata-rata dilakukan oleh siswa kelas 8 jika dipresentasikan sekitar 7% dengan penyelesaian diberikan peringatan terakhir.

Melihat banyaknya pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar padahal peserta didik telah mengikuti pembelajaran PPKn, maka dari itu peneliti menganggap perlu sekali dilakukan kajian terkait pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum, mengingat peraturan yang mereka langgar ini berlaku di sekolah untuk menciptakan ketertiban yang aman dan damai. Hal ini menunjukkan kecenderungan kesadaran hukum siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar masih sangat rendah. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting untuk membangun masyarakat yang terdiri dari

remaja yang sadar hukum dan norma yang berlaku. Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian secara ilmiah dengan siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar”.

Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif ini menggunakan metode asosiatif dengan hubungan kausal. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Batu di Jl. Lintas Bagansiapiapi, Bantayan, Kec. Batu Hampar, Kab Rokan Hilir, Prov. Riau, 28912. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 hingga bulan Desember 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang memiliki jumlah siswa sebanyak 320 siswa yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX pada periode 2023/2024. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan proporsional random sampling (Suharsimi Arikunto) yang selanjutnya ditetapkan sebesar 25% dari total populasi sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 80 siswa. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner (angket), dokumentasi serta studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji F, analisis regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi (R-Square), dan korelasi (R).

Hasil dan pembahasan

Mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada judul Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar. Penelitian ini menggunakan metode angket dengan sampel sebanyak 80 siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar sebagai responden. Selain itu, untuk memperjelas penelitian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Variabel Pembelajaran PPKn (Variabel X)

No	Tabel	Alternatif Jawaban							
		SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	4.4	41	51,2%	38	47,5%	1	1,3%	0	0%
2	4.5	44	55%	32	40%	4	5%	0	0%
3	4.6	48	60%	26	32,5%	6	7,5%	0	0%
4	4.7	60	75%	20	25%	0	0%	0	0%
5	4.8	49	61,3%	27	33,8%	4	5%	0	0%

No	Tabel	Alternatif Jawaban							
		SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
6	4.9	41	51,2%	30	37,5%	9	11,3%	0	0%
7	4.10	41	51,2%	37	46,3%	2	2,5%	0	0%
8	4.11	42	52,5%	29	36,3%	8	10%	1	1,3%
9	4.12	39	48,8%	35	43,8%	5	6,3%	1	1,3%
10	4.13	49	61,3%	28	35%	3	3,8%	0	0%
11	4.14	40	50%	32	40%	7	8,8%	1	1,3%
Jumlah		494	617,5%	334	417,7%	49	61,5%	3	3,9%
Rata-rata		44,90	56,14%	30,36	37,97%	4,45	5,59%	0,27	0,35%

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh rekapitulasi jawaban responden pada variabel Pembelajaran PPKn (variabel X) sebanyak 56,14% responden menjawab Sangat Setuju, 37,97% responden menjawab Setuju, sebanyak 4,45% responden menjawab Tidak Setuju dan 0,35% responden menjawab Sangat Tidak Setuju.

Maka hasil yang diperoleh berdasarkan rekapitulasi di atas yaitu: Sangat Setuju + Setuju = 56,14% + 37,97% = 94,11%. Dapat disimpulkan bahwa variabel pembelajaran PPKn berada pada rentang 75,01%-100% “Sangat Baik”.

Tabel 2. Rekapitulasi Variabel Kesadaran Hukum (Variabel Y)

No	Tabel	Alternatif Jawaban							
		SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	4.20	39	48,8%	37,25	46,6%	3,75	4,7%	0	0%
2	4.27	37,5	46,9%	38,8	48,5%	3	3,8%	0,7	0,9%
3	4.33	33,2	41,5%	42,8	53,5%	3,4	4,3%	0,6	0,8%
4	4.43	45,9	57,4%	29,8	37,2%	3,22	4%	0,11	1,4%
Jumlah		155,6	194,6%	148,65	185,8%	13,37	16,8%	1,41	3,1%
Rata-rata		38,9	48,6%	37,16	46,4%	3,34	4,2%	0,35	1%

Sumber : Data Olahan 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh rekapitulasi jawaban responden pada variabel Kesadaran Hukum (variabel Y) sebanyak 48,6% responden menjawab “Sangat Setuju”, sebanyak 46,4% responden menjawab “Setuju”, sebanyak 4,2% responden menjawab “Tidak Setuju” dan 1% responden menjawab “Sangat Tidak Setuju”.

Maka hasil yang diperoleh berdasarkan rekapitulasi di atas yaitu: Sangat Setuju + Setuju = 48,6% + 46,4% = 95%. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran hukum berada pada rentang 75,01% - 100% "Sangat Baik".

Pembelajaran PPKn pada siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar

Pembelajaran PPKn (variabel X) terdiri dari sebelas indikator yaitu indikator pertama mengetahui tujuan pembelajaran PPKn memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 51,2%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah mengetahui tujuan pembelajaran PPKn. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 1,3% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum mengetahui tujuan pembelajaran PPKn, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator kedua dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu mampu memahami makna Pancasila memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 55%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah memahami makna Pancasila. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 5% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum mampu memahami makna Pancasila, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator ketiga dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu mampu menyampaikan makna Pancasila memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 60%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah mampu menyampaikan makna Pancasila. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 7,5% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum mampu menyampaikan makna Pancasila, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator keempat dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban di sekolah memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 75%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah

mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban di sekolah. Hal ini menandakan siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar secara keseluruhan sudah mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya di sekolah.

Indikator kelima dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu sudah memiliki karakteristik sebagai warga negara yang baik memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 61,3%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah memiliki karakteristik sebagai warga negara yang baik. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 5% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum memiliki karakteristik sebagai warga negara yang baik, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator keenam dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu mampu berpikir kritis dalam lingkungan sekolah/masyarakat memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 51,2%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah mampu berpikir kritis dalam lingkungan sekolah/masyarakat. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 11,3% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum mampu berpikir kritis dalam lingkungan sekolah/masyarakat, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator ketujuh dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu sudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah/masyarakat memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah "Sangat Setuju" dengan persentase 51,2%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah/masyarakat. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 2,5% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang belum mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah/masyarakat, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator kedelapan dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu sudah mengikuti pembelajaran PPKn secara aktif

(bertanya dan menjawab) memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase 52,5%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa telah mengikuti pembelajaran PPKn secara aktif (bertanya dan menjawab). Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 10% menjawab “Tidak Setuju” dan 1,3% menjawab “Sangat Tidak Setuju” dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang tidak mengikuti pembelajaran PPKn secara aktif (bertanya dan menjawab), hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator kesembilan dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu selalu fokus memperhatikan penjelasan dari guru memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase 48,8%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa selalu fokus memperhatikan penjelasan dari guru. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 6,3% menjawab “Tidak Setuju” dan 1,3% menjawab “Sangat Tidak Setuju” dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang tidak fokus memperhatikan penjelasan dari guru, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator kesepuluh dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase 61,3%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 3,8% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Indikator kesebelas dalam variabel pembelajaran PPKn (variabel X) yaitu selalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase 50%. Berdasarkan jawaban dari siswa yang dominan dapat dilihat bahwa siswa selalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Namun berdasarkan indikator ini ditemukan 8,8% yang menjawab “Tidak Setuju” dan 1,3% menjawab “Sangat Tidak Setuju” dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang tidak

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar

Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada indikator pertama yaitu pengetahuan hukum memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase 48,8%. Hal ini ditandai dengan peserta didik mampu mengetahui bahwa terdapat aturan dan tata tertib di sekolah yang berlaku serta mengetahui isi dari aturan dan tata tertib tersebut, peserta didik juga mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara termasuk hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah, dan peserta didik mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta didik. Namun berdasarkan indikator pengetahuan hukum ditemukan 4,7% dari siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang dalam hal ini pengetahuan hukumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rinoyo & Kuncorowati, (2016:13) di SMA Negeri 4 Yogyakarta dikatakan bahwa seberapa baik pengetahuan hukum siswa tentang hukum dan isi peraturan sekolah mempengaruhi seberapa baik mereka mematuhi. Semakin banyak pengetahuan hukum siswa tentang isi peraturan sekolah, semakin baik mereka mematuhi. Sebaliknya, semakin sedikit pengetahuan hukum siswa tentang isi peraturan sekolah, semakin sedikit mereka mematuhi. Sebagaimana dinyatakan oleh penelitian Astim (2010:3) pengetahuan hukum merupakan komponen kesadaran hukum di mana seseorang mengenal, menghafal, mengingat, dan memahami hukum atau aturan.

Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada indikator kedua yaitu pemahaman hukum memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Setuju” dengan persentase 48,5%. Hal ini ditandai dengan peserta didik mampu memahami konsep dasar hukum, seperti hak dan kewajiban, peraturan dan sanksi dalam konteks pendidikan seperti hak untuk belajar di kelas serta kewajiban untuk menghormati guru dan teman sekelas, memahami peran dan fungsi lembaga hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menegakkan hukum di Indonesia, memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan sistem peradilan di Indonesia serta mampu menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di

sekolah dan akibat dari pelanggaran peraturan tersebut. Namun berdasarkan indikator pemahaman hukum ditemukan 3,8% menjawab “Tidak Setuju” dan 0,9% menjawab “Sangat Tidak Setuju”, sehingga masih ditemukan 4,7% siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang dalam hal ini pemahaman hukumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hutrista et al., (2023:121) di SMA Swasta ST. Petrus Kewapante dikatakan bahwa meskipun aturan tata tertib sekolah telah diterapkan, siswa masih sangat kurang menyadarinya. Ini terjadi karena siswa tidak memahami pentingnya tata tertib yang diterapkan dan tujuan dari adanya tata tertib. Beberapa siswa merasa terbebani dengan aturan, dan ada juga siswa yang melanggar, baik dengan sengaja maupun tidak.

Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada indikator ketiga yaitu sikap hukum memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Setuju” dengan persentase memperoleh sebanyak 53,5%. Hal ini ditandai dengan peserta didik mampu menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang ditetapkan sekolah, bertanggung jawab atas tindakan dan menerima konsekuensi dari pelanggaran peraturan yang dilakukan di sekolah, terbuka untuk mempelajari tentang hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah, menunjukkan sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap teman sekelas dan orang lain di lingkungan sekolah serta dapat bekerja sama dengan guru dan teman sekelas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Namun berdasarkan indikator sikap hukum ditemukan 4,3% siswa menjawab “Tidak Setuju” dan 0,8% responden menjawab “Sangat Tidak Setuju”, maka dari itu masih ditemukan 5,1% siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang dalam hal ini sikap hukumnya masih rendah, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Bramantyo & Suwarno (2020:4) ada dua faktor yang mempengaruhi rendahnya sikap hukum siswa, yaitu: faktor internal antara lain kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya menaati aturan dan tata tertib sekolah, kepuasan yang dirasakan siswa jika melanggar aturan dan buruknya psikologi juga mempengaruhi beratnya pelanggaran peraturan di sekolah. Kedua faktor eksternal, yakni pengaruh

teman sebaya, lingkungan bermain, keluarga, masyarakat, rendahnya hukuman dan faktor lain di luar siswa.

Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada indikator keempat yaitu pola perilaku hukum memperoleh hasil jawaban yang dominan adalah “Sangat Setuju” dengan persentase memperoleh sebanyak 57,4%. Hal ini ditandai dengan peserta didik mampu mengikuti upacara bendera setiap hari senin, datang tepat waktu ke sekolah, tidak membolos walaupun ada jam mata pelajaran yang tidak di senangi, tidak suka menyontek saat ulangan, tidak bermain handphone saat jam pelajaran berlangsung, tidak menggunakan handphone untuk bekerja sama dengan teman waktu ujian, menegur teman yang berbuat gaduh saat jam pelajaran kosong, tidak merokok di lingkungan sekolah serta tidak mengikuti ajakan teman untuk tawuran dengan siswa sekolah lain. Namun berdasarkan indikator pola perilaku hukum ditemukan 4% menjawab “Tidak Setuju” dan 1,4% menjawab “Sangat Tidak Setuju”, maka dari itu masih ditemukan 5,4% siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar yang dalam hal ini pola perilaku hukumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ramadhani et al., (2020:3) dikatakan bahwa pola perilaku hukum siswa di sekolah dalam hal melanggar peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari siswa itu sendiri, guru, kemalasan siswa itu sendiri, dan kurangnya tanggung jawab siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah orang tua, guru, teman sebaya dan masyarakat/lingkungan.

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana hasil olahan output IBM SPSS Version 25 diketahui regresi linear sederhana yaitu $Y = 41,629 + 1,064 X$. Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan konstanta (a) sebesar 41,629 dan nilai Pembelajaran PPKn (b/kofisien regresi) sebesar 1,064. Nilai konstanta sebesar 41,629 yang berarti nilai konsistensi variabel Pembelajaran PPKn sebesar 41,629 dan nilai kofisien regresi X sebesar 1,064, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pembelajaran PPKn, maka nilai Kesadaran Hukum bertambah sebesar 1,064. Kofisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh pembelajaran PPKn (variabel X) terhadap kesadaran hukum (variabel Y) adalah **positif**. Berdasarkan tabel uji *Coefficients* dilakukan

uji hipotesis dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran PPKn (variabel X) **berpengaruh positif** terhadap kesadaran hukum (variabel Y). Artinya hipotesis dalam penelitian **diterima**.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu apakah ada Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 30,768 dan F_{tabel} sebesar 3,96 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis penelitian ini di terima bahwa ada pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar dan dari hasil perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,283 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pembelajaran PPKn) terhadap variabel terikat (Kesadaran Hukum) adalah sebesar 28,3%. Sedangkan 71,7% ($100\% - 28,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran dan rekomendasi pada penelitian ini yakni, pada dasarnya pembelajaran PPKn dapat meningkatkan kesadaran hukum pada siswa SMP. Namun, dalam penelitian ini pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada siswa SMP hanya memberi kontribusi sebesar 28,3% atau berada pada taraf rendah. Oleh sebab itu, kepada guru PPKn di SMP Negeri 1 Batu Hampar pada saat kegiatan pembelajaran PPKn berlangsung agar dapat terus menciptakan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif serta variatif supaya pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak mudah bosan selama pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan juga terus meningkat.

Referensi

Bramantyo, R. Y., & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 14(2), 124–136. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.627>.

- Fatkhurrahman, E. (2020). Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan*, 2(1), 60–65. <http://journal-litbang-rekarta.co.id/index.php/jrip/>
- Hutrista, P., Kasim, A. M., & Aswim, D. (2023). Pengaruh Tata Tertib Sekolah Terhadap Kesadaran Siswa di SMA SWASTA St. Petrus Kewapante. *SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 119–128. <https://doi.org/10.59632/sjpp.v1i1.156>
- Pradesa, K. (2020). Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Membangun Kesadaran Hukum Pada Siswa Kelas X. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 2(3), 34–42.
- Ramadhani, W., Astuti, I., & Yuline, Y. (2020). Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Siswa di SMP Negeri 22 Pontianak Beserta Bantuannya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(9).
- Rinoyo, G., & Kuncorowati, P. W. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Hukum dengan Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah pada Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 1–16.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (Sapriya & R. M. (ed); E. pert). (2017). *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: kultur akademis dan pedagogis*.
- Susanto, E. (2016). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Pengembangan Civic Disposition Siswa SMA N Se-Kota Bandar Lampung. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 96–105.
- Trisiana, A. (2020). Penguatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Digitalisasi Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9304>